

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Isu mengenai lingkungan merupakan salah satu isu yang sedang diperhatikan dan disoroti dalam studi Hubungan Internasional. Pada saat ini Hubungan Internasional tidak lagi hanya terfokus pada isu-isu konfliktual saja, melainkan mulai terfokus kepada isu mengenai lingkungan hidup. Persoalan ini merupakan faktor yang berdampak sangat luas diberbagai segi kehidupan dinamika dunia internasional. Terutama dengan adanya globalisasi yang merupakan arus kekuatan yang dampaknya tidak dapat dihindarkan oleh negara manapun di dunia (Simamora 2013, hlm.2).

Semakin meningkatnya jumlah penduduk dunia internasional tentu saja memberikan pengaruh yang besar pada kondisi lingkungan di berbagai negara atau wilayah-wilayah di planet Bumi ini. Hal ini juga semakin diperparah dengan semakin meningkatnya aktivitas pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang terlalu berlebihan, pemanasan global dan perubahan iklim. Seperti yang sedang terjadi di dunia internasional sekarang ini dimana pemanfaatan atau pengelolaan lingkungan yang terlalu berlebihan bahkan merusak, tidak ramah lingkungan dan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Sektor lingkungan hidup semakin dipersulit dengan banyak beragam isu-isunya (Buzan dkk. 1998, hlm.74).

Seperti yang terjadi di Indonesia, pembakaran hutan bahkan perusakan hutan akibat penebangan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dipicu oleh kebutuhan manusia yang semakin hari semakin meningkat yang kemudian menyebabkan semakin meningkatnya eksploitasi terhadap sumber daya alam yang tentu saja akan berdampak langsung secara signifikan pada kondisi lingkungan hidup. Selain itu, dengan adanya eksploitasi sumber daya alam yang secara berlebihan tentu saja dapat semakin meningkatkan pencemaran dan juga kerusakan pada lingkungan hidup.

Berbagai isu-isu lingkungan seperti pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam tentu merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan, selain itu dengan semakin meningkatnya pemanasan global dan perubahan iklim secara ekstrim dan drastis tentu saja juga semakin mengancam stabilitas kondisi lingkungan hidup. Dalam menanggapi dan menyikapi isu lingkungan tersebut, dunia internasional mulai semakin memberikan perhatian serius dengan adanya Konferensi Stockholm pada tahun 1972, yang kemudian dilanjutkan dengan semakin banyaknya kerjasama-kerjasama internasional dalam menyikapi dan menangani masalah lingkungan hidup yang semakin meningkat drastis. Kondisi lingkungan hidup yang semakin memburuk tentu saja dapat mempengaruhi kondisi suatu negara, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki potensi sumber daya alam yang sudah sepatutnya untuk dimanfaatkan dengan bijak, tepat, ramah lingkungan dan dilestarikan sebaik mungkin. Pola pembangunan dengan pengembangan lingkungan hidup, memerlukan pengetatan dalam penggunaan air dan tanah dan juga sumber alam lainnya (Salim 1986, hlm.10)

Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia merupakan masalah yang cukup serius yang hingga saat ini belum dapat diatasi dengan baik, apabila dilihat dari segi sejarah, Indonesia memang tidak pernah luput dari persoalan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah sering cukup terjadi sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda terkait dengan kebakaran hutan seperti Ordonansi Hutan untuk Jawa dan Madura (1927) dan lain-lain. Pasca Indonesia menyatakan kemerdekaannya pun kebakaran hutan dan lahan masih juga tetap berlanjut. Tercatat ada lima kejadian besar periode kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia yaitu kebakaran yang terjadi di tahun 1982-1983 yang menghancurkan 3,2 juta hektare dengan kerugian dinilai mencapai 6 triliun rupiah, kemudian pada tahun 1987 kebakaran kembali menghancurkan 66,000 Ha (Sulistiwati, 2015). Kemudian kebakaran pada tahun 1991 dengan total menghancurkan 500,000 Ha, tahun 1994-1995 yang menghancurkan lebih dari 5 juta Ha, kemudian pada tahun 1997-1998

yang menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 2,7 miliar (Sulistiowati, 2015). Kebakaran hutan merupakan masalah dalam melakukan pengelolaan lanskap yang terjadi setiap tahun terutama pada musim kering, ketika api dipakai untuk membersihkan atau menyiapkan lahan pertanian yang akan dibuat setelahnya. Asap yang dihasilkan dari kebakaran ini kemudian menyebabkan polusi udara yang sangat masif dan destruktif sehingga berdampak sangat luas bagi beberapa atau sebagian wilayah-wilayah di Indonesia dan juga ke negara-negara tetangga terdekat seperti Malaysia dan Singapura. Asap dari kebakaran lahan gambut bahkan memiliki dampak yang lebih masif lagi, bahkan menjadi sumber 90% asap yang muncul (<http://www.worldbank.org>). Hal ini terjadi dikarenakan asap yang berasal dari kebakaran lahan gambut memproduksi tiga sampai enam kali lebih banyak partikel dibanding kebakaran dari jenis-jenis tanah lainnya. Antara lain, beberapa lahan gambut yang terletak di dataran rendah Kalimantan, Sumatra dan Papua, yang mengalami dampak paling terparah dari kebakaran dan asap yang ditimbulkannya.

Krisis kebakaran dan asap Indonesia pada tahun 2015 telah disebut sebagai “tindakan kriminal lingkungan hidup terbesar pada abad ke-21” (<http://www.worldbank.org>). Selama 15 tahun terakhir, sebagian besar kebakaran yang terjadi di Indonesia berada di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Riau. Total kebakaran di ketiga provinsi ini mencapai 44% dari semua kebakaran yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2001. Di tahun 2015, jumlah peringatan titik api di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan mencapai lebih dari 27.000 peringatan, yang mana merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan rata-rata 5.500 peringatan di setiap provinsi pada lima tahun sebelumnya (Chamorro dkk. 2017).

Sejumlah besar wilayah hutan dan lahan terbakar tidak terkendali sejak bulan Agustus 2015, yang kemudian menimbulkan dampak pada kerusakan masif lingkungan flora dan fauna, dan juga kesehatan dan aktivitas sehari-hari jutaan masyarakat Indonesia di wilayah sekitar kebakaran sangat terasa dan merugikan. Perekonomian Indonesia juga mengalami kerugian hingga mencapai milyaran dolar. Perkiraan awal dari kerugian ekonomi untuk Indonesia akibat kebakaran hutan tahun

ini melampaui \$16 milyar. Jumlah ini dua kali lebih besar dari kerugian dan kerusakan akibat tsunami tahun 2004 di Aceh, setara dengan 1.8% Produk Domestik Brutto (PDB) (<http://www.worldbank.org>). Lebih dari 2,6 juta hektare hutan, lahan gambut dan lahan lainnya terbakar pada tahun 2015 dengan total luas 4,5 kali lebih luas dari Pulau Bali. Dampak pada wilayah yang terbakar termasuk hilangnya kayu atau produk non-kayu, serta habitat satwa Orangutan, Beruang Madu dan lain-lain. Kerugian lingkungan terkait keanekaragaman hayati diperkirakan bernilai sekitar \$295 juta pada tahun 2015 (<http://www.worldbank.org>).

Dalam sumber daya alam hayati yang terdiri dari alam hewani dan alam nabati, di mana sumber daya alam tersebut baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat digantikan, bahkan unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling berketergantungan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila ada kerusakan atau gangguan yang dialami oleh salah satu unsur akan berakibat terganggunya suatu ekosistem. Indonesia yang memiliki berbagai macam satwa, yang dimana satwa-satwa tersebut tersebar keseluruhan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Satwa-satwa yang berada di habitat di wilayah Indonesia salah satu cirinya yaitu berlokasi di suatu pulau yang ditinggali oleh satwa tersebut, dikarenakan ekosistem di dalam pulau tersebut mendukung akan perkembangbiakan dan kelangsungan hidup satwa tersebut. Kekayaan keanekaragaman spesies primata yang ada di Indonesia, yang dimana salah satu dari spesies primata tersebut adalah Orangutan. Orangutan merupakan satu-satunya spesies Kera Besar yang dapat ditemukan di Asia. Pada periode sekarang populasi Orangutan yang tersisa hanya terdapat di pulau Sumatera dan Kalimantan. Populasi Orangutan di kedua pulau tersebut telah dibedakan menjadi dua spesies yaitu Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*) dan Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*).

Dikenal karena khas warna bulu merahnya, Orangutan adalah mamalia terbesar, yang menghabiskan sebagian besar waktu atau aktivitasnya diantara pepohonan. Memiliki lengan yang panjang dan kuat, dan juga genggam tangan dan kaki yang

kuat sehingga memungkinkan Orangutan untuk dapat bergerak melalui cabang-cabang pohon. Orangutan memiliki kemiripan gen 96,4% dari gen manusia dan merupakan makhluk yang sangat cerdas (www.worldwildlife.org). Dikarenakan kemiripan genetiknya dengan manusia, Orangutan berpotensi bagi pengembangan pengetahuan tanaman obat dan ketahanan pangan.

Mengapa Orangutan penting bagi hutan dan manusia? Orangutan merupakan pemelihara hutan (www.wwf.or.id). Orangutan membantu dalam menyebarkan biji tanaman. Pada saat memakan buah, Orangutan mengeluarkan biji-bijiannya bersama kotoran mereka. Biji-biji itu kemudian menyebar ke lingkup wilayah yang luas. Apabila biji-bijian itu jatuh ke tanah subur, maka akan tumbuh menjadi pohon baru, sehingga Orangutan memiliki peran penting dalam menjaga regenerasi hutan. Tumbuhan-tumbuhan baru yang telah disebarkan oleh Orangutan berfungsi untuk mengabsorpsi karbon dari atmosfer dan menyimpannya di hutan (Forum Orangutan Indonesia 2015b, hlm.25). Selain itu Orangutan juga berkontribusi dalam membantu pertumbuhan pohon baru. Dimana ketika Pohon membutuhkan sinar matahari, dikarenakan kondisi hutan sangat lebat, sinar matahari terhalang untuk sampai ke tanah. Akibatnya pohon-pohon kecil tidak mendapat sinar matahari dan terganggu pertumbuhannya. Ketika makan atau membuat sarang, Orangutan mematahkan dahan pohon dan mengambil daun-daunannya, sehingga membuat bagian atas pohon tersebut menjadi terbuka sehingga sinar matahari dapat menembus dan sampai di permukaan tanah.

Pentingnya peran Orangutan bagi ekosistem hutan ini menjadikan Orangutan sebagai spesies payung, dimana perlindungan terhadap Orangutan juga akan ikut melindungi satwa-satwa liar dan tumbuhan-tumbuhan penting lainnya di dalam ekosistem hutan. Dan sebaliknya, kepunahan Orangutan pada sebuah ekosistem akan mengakibatkan penurunan penyebaran bibit-bibit tumbuhan yang disebarkan oleh Orangutan, akibatnya hutan akan menjadi miskin dan dapat mengancam eksistensi keberadaan satwa liar lainnya yang tergantung pada tumbuhan. Terjaganya habitat Orangutan, selain memberikan keuntungan bagi hutan dan keanekaragaman hayati di

dalamnya, juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya, diantaranya adalah menghindari dan meminimalisir konflik yang terjadi antara masyarakat dan satwa liar dan melindungi dari kemungkinan bencana alam, contoh seperti tanah longsor dan banjir.

Orangutan Sumatera dan Orangutan Kalimantan adalah dua jenis satwa primata yang menjadi bagian penting dari kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia, dan juga merupakan satu-satunya kera besar yang hidup di kawasan Asia, sementara tiga jenis lainnya yang merupakan masih kerabat dekat dari Orangutan yaitu Gorila, Simpanse dan Bonobo hidup di benua Afrika. Kelestarian Orangutan juga menjamin kelestarian hutan yang menjadi habitatnya dan kelestarian makhluk-makhluk hidup lainnya. Dari sisi ilmu pengetahuan, Orangutan juga menghadirkan suatu cabang dari evolusi Kera Besar yang berbeda dengan garis keturunan Kera Besar Afrika. Sebagai satu-satunya Kera Besar yang hidup di kawasan Asia, Orangutan memiliki potensi yang besar untuk menjadi ikon pariwisata terutama ekowisata baik di kawasan Asia secara umum dan terlebih lagi khususnya di Indonesia sendiri.

Jumlah populasi Orangutan di Kalimantan tidak dapat diketahui secara tepat, kecuali yang berada di wilayah Sabah, yang dimana terdapat survei udara secara komprehensif pada awal tahun 2000an yang memberikan perkiraan 11.000 individu Orangutan Kalimantan untuk di seluruh Sabah (<http://www.iucnredlist.org>). Sedangkan, untuk Orangutan Sumatra Perkiraan populasi terbaru pada tahun 2016 adalah 14.613 individu, di daerah total 17.797 km² hutan (<http://www.iucnredlist.org>). Diperkirakan 2000 hingga 3000 Orangutan Kalimantan telah dibunuh setiap tahunnya dalam empat dekade terakhir ini, dengan tujuan untuk diambil dagingnya (<http://nationalgeographic.co.id>).

Ancaman-ancaman terhadap keberlangsungan dan kelestarian Orangutan dapat disebabkan karena beberapa hal seperti perubahan fungsi hutan menjadi area komersialisasi berupa perkebunan seperti kelapa sawit dan pertambangan yang menyebabkan area hutan yang menjadi habitat Orangutan semakin bertambah sempit

dan rusak, ketersediaan sumber makanan bagi Orangutan menjadi semakin berkurang yang kemudian menyebabkan banyak Orangutan terpaksa memasuki perkebunan milik masyarakat umum, ladang bahkan perkebunan kelapa sawit untuk mencari makanan. Manusia yang melihat hal ini kemudian menganggap Orangutan sebagai hama dan berusaha menyingkirkan bahkan membunuh Orangutan. Dalam realitanya, manusia lah yang mengambil habitat Orangutan dan merampas hak Orangutan untuk dapat hidup bebas di alam liar. Kemudian Orangutan juga semakin terancam dengan banyaknya perburuan ilegal. Orangutan juga ditangkap untuk dijadikan binatang peliharaan, memelihara Orangutan sebagai binatang peliharaan di rumah merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Banyaknya kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan yang telah disebutkan sebelumnya di beberapa wilayah di Indonesia terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera, merupakan contoh dimana masih minimnya sekali pemerintah Indonesia dalam berkomitmen untuk melakukan pengawasan, penanganan dan memberikan hukuman dan sanksi yang tegas dan berat terhadap para pelaku, sehingga tidak membuat efek jera kepada para pelaku kejahatan terhadap tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.

Orangutan yang habitatnya adalah hutan, khususnya hutan primer, adalah salah satu jenis satwa liar yang sangat terancam oleh adanya kebakaran hutan, dengan semakin meningkatnya aktivitas pembakaran hutan terutama ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tentu saja semakin membuat habitat asli Orangutan tersebut hancur dan hilang sehingga membuat Orangutan terpaksa untuk berpindah ke wilayah-wilayah yang dimana sudah ada terdapat pemukiman manusia, dengan semakin terus terjadinya hal-hal seperti ini tentu saja semakin meningkatkan resiko adanya pergesekan ataupun konflik dengan manusia. Disamping itu, sekitar 70% populasi Orangutan berada di luar kawasan konservasi, baik itu di hutan produksi maupun areal penggunaan lain, seperti perkebunan (Forum Orangutan Indonesia 2015a, hlm.5).

Terkait dengan hal tersebut, peran International Non-Governmental Organization (INGO) dalam melakukan upaya pelestarian Orangutan sangat penting dan sangat dibutuhkan, salah satu INGO tersebut adalah World Wide Fund For Nature (WWF). WWF telah bekerja pada konservasi orang utan sejak 1970-an dalam kemitraan dengan kelompok-kelompok lokal dan internasional, termasuk lembaga-lembaga penelitian, universitas, badan pemerintah dan masyarakat lokal (<http://wwf.panda.org>). WWF Indonesia adalah organisasi konservasi nasional yang mandiri dan merupakan bagian dari jaringan global WWF. WWF Indonesia juga bekerja bersama sejumlah Non-Governmental Organization (NGO) lokal yang bergerak di bidang pelestarian Orangutan dalam mempublikasikan panduan teknis Penanganan Konflik Manusia dan Orangutan di Dalam dan Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit. Dokumen tersebut dimaksudkan untuk membantu sektor industri dalam mengidentifikasi dan menentukan langkah-langkah secara tepat untuk mengadopsi praktik-praktik pengelolaan yang lebih baik (*Beter Management Practices/BMP*) yang bermanfaat bagi konservasi dan industri. WWF juga terlibat secara aktif dalam pengembangan Rencana Aksi dan Strategi Konservasi Orangutan yang dirilis oleh Presiden RI tahun 2007 (www.wwf.or.id).

I.2 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana Upaya World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Menangani Dampak Kebakaran Hutan Tahun 2015 Terhadap Orangutan Di Indonesia?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan Kebakaran Hutan Tahun 2015 Yang Terjadi Di Indonesia.
2. Mengetahui Dampak Kebakaran Hutan Tahun 2015 Terhadap Orangutan Di Indonesia.

3. Memahami Peran Penting Orangutan Di Dalam Ekosistem.
4. Menganalisa Upaya World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Menangani Dampak Kebakaran Hutan Tahun 2015 Terhadap Orangutan Di Indonesia

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi informasi ataupun data dalam perkembangan studi Hubungan Internasional yang berketerkaitan dengan lingkungan hidup terutama Orangutan.
2. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi tambahan untuk berbagai karya ilmiah yang terutama berfokus mengenai upaya WWF dalam lingkungan hidup.

I.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa referensi atau sumber lain yang digunakan penulis sebagai sumber tinjauan mengenai topik yang penulis bahas dalam penelitian. Beberapa sumber tersebut dapat memberikan kontribusi bagi penelitian penulis.

Tinjauan pustaka yang pertama adalah laporan yang dibuat oleh *World Bank Group* dengan judul “Kerugian dari Kebakaran Hutan Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran tahun 2015”. Secara keseluruhan dalam laporan Kerugian dari Kebakaran Hutan Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran tahun 2015 yang dibuat oleh *World Bank Group* ini membahas mengenai analisa dampak kerugian yang dialami di sektor perekonomian terutama di wilayah yang berdampak langsung dengan asap dari kebakaran hutan ini dan estimasi kerugian-kerugian apa saja yang

dialami ketika krisis kebakaran tahun 2015 tersebut. Dampak kumulatif yang tidak diketahui dari kebakaran dan kabut asap terhadap flora dan fauna juga ikut dibahas dan dianalisa di dalam laporan ini, dan juga respon dan langkah pemerintah terkait kasus ini.

Bencana kebakaran parah yang dibuat oleh manusia menyebabkan bencana ekonomi dan kelaparan. Pengeringan dan konversi lahan gambut, yang terutama didorong oleh produksi minyak kelapa sawit, berkontribusi besar terhadap peningkatan intensitas kabut asap dari kebakaran. Bank Dunia memperkirakan bahwa kebakaran di Indonesia di tahun 2015 menelan biaya setidaknya Rp 221 triliun (16,1 dolar AS) atau setara dengan 1,9 persen dari PDB tahun 2015, Analisis ini memperkirakan dampak terhadap sektor pertanian, kehutanan, perdagangan, pariwisata, dan perhubungan. Sektor pertanian dan kehutanan juga telah menderita kerugian dan kerusakan yang diperkirakan sebesar Rp 120 triliun (8,8 miliar dolar AS) pada tahun 2015.

Spesies mungkin dapat beradaptasi, namun dalam melakukan adaptasi tidak selalu menguntungkan atau mungkin untuk dapat dilakukan. Kebakaran menghilangkan organisme hidup yang berada di tanah, dan membutuhkan waktu cukup lama bahkan hingga bertahun-tahun sebelum spesies perintis ini bias kembali berkolonisasi lagi. Kemudian yang lebih memprihatinkan lagi adalah tekanan besar terhadap lingkungan hidup yang terdampak dalam jangka panjang, yang akhirnya akan mengarah pada titik kritis yang tidak dapat dihindari. Setelah itu, ekosistem tentu saja akan berubah secara permanen dan tidak dapat dikembalikan lagi seperti kondisi semula.

Presiden Joko Widodo menyerukan moratorium konsesi lahan gambut baru dan pembatalan konsesi yang sudah ada yang belum dikembangkan, sehingga menghentikan konversi hutan gambut dan rawa gambut menjadi lahan pertanian secara hukum dan juga diserukan untuk pemulihan lahan gambut kembali.

Penulis mendapatkan masukan dari laporan ini tentang bagaimana hasil analisa dampak terhadap perekonomian terutama lingkungan hidup dari Krisis Kebakaran tahun 2015 ternyata sangat signifikan sekali. Dengan kerugian ekonomi yang sangat signifikan tentu saja dapat dipertanyakan secara garis besar dengan bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup yang sudah pasti terkena dampak yang paling besar dalam kasus ini, dan tentu saja dengan keberlangsungan lingkungan hidup mempunyai kontribusi besar terhadap jalannya aktivitas ekonomi.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan laporan ini adalah penelitian penulis lebih terfokus kepada dampak kebakaran hutan tahun 2015 terhadap Orangutan dan bagaimana upaya WWF dalam menanganinya, sedangkan laporan ini lebih terfokus kepada dampak kebakaran hutan tahun 2015 terhadap sektor perekonomian.

Tinjauan pustaka yang kedua adalah jurnal yang dibuat oleh S. Andy Cahyono, Sofyan P Warsito, Wahyu Andayani dan Dwidjono H Darwanto dengan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan di Indonesia dan Implikasi Kebijakannya” Jurnal Sylva Vol. 3 No. 1, Januari 2015 (103-112) menjelaskan mengenai kebakaran hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan dan kehutanan yang krusial serta menjadi perhatian lokal dan global, perlu adanya perubahan paradigma dalam pengendalian kebakaran hutan dari kegiatan pemadaman kebakaran hutan menjadi upaya preventif pencegahan terjadinya titik-titik panas sebagai indikasi awal kebakaran hutan.

Kebijakan pemerintah di tahun 1980 yang dimana membuka konsesi hutan, kemudian mengubah hutan alam menjadi perkebunan, transmigrasi, pengembangan irigasi, dan perluasan pertanian diduga sebagai penyebab semakin meningkatnya luas kebakaran hutan. Resiko terjadinya kebakaran hutan meningkat dengan adanya konversi dari hutan alam menjadi hutan tanaman dan perkebunan (sawit, karet). Salah satu determinan konversi hutan ke penggunaan lain adalah harga komoditi. *El nino* dan krisis ekonomi mempengaruhi luas areal hutan yang terbakar di Sumatera, Kalimantan dan Papua, namun dampaknya relatif kecil yang ditunjukkan besaran

elastisitasnya yang dibawah satu. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya el nino dan krisis ekonomi kurang berdampak besar terhadap kebakaran hutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi luas kebakaran hutan dan hutan rawa gambut di Sumatera, Kalimantan, dan Papua adalah harga kayu bulat, harga ekspor CPO, el nino, anggaran Kementerian Kehutanan, krisis ekonomi, jumlah titik panas. Determinan luas kebakaran hutan yang sangat signifikan pengaruhnya adalah jumlah titik panas yang terjadi di setiap pulau. Kebijakan pengendalian kebakaran hutan lebih baik diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya atau munculnya titik panas dibandingkan dengan kebijakan sekarang yang lebih cenderung pada upaya untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan.

Penulis melihat penelitian yang diberikan oleh jurnal ini memberikan penggunaan analogi yang mudah untuk dimengerti dan juga memudahkan penulis untuk memahami maksud terpenting dari jurnal ini dan mendapatkan analisa yang lebih mendalam mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan di Indonesia.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan jurnal ini adalah penelitian penulis lebih membahas mengenai bagaimana upaya WWF dalam menangani Orangutan yang terkena dampak kebakaran hutan tahun 2015, sedangkan jurnal ini lebih terfokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi luas kebakaran hutan dan hutan rawa, serta determinan luas kebakaran hutan yang sangat signifikan pengaruhnya, dan juga mengenai kebijakan pengendalian kebakaran hutan.

Tinjauan pustaka yang ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Nurlaila dengan judul Dampak Pemusnahan Orangutan di Kalimantan Timur Oleh Perusahaan Asing Malaysia (PT Khaleda Agroprima Malindo) eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (1): 77-90. Jurnal ini secara keseluruhan membahas mengenai dampak pemusnahan Orangutan di Kalimantan Timur oleh perusahaan Asing Malaysia dan juga untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melindungi Orangutan di Kalimantan Timur.

Semakin meluas dan bertambahnya usaha perkebunan sawit di Indonesia, dikarenakan pemerintah Indonesia justru memberikan izin Hak Guna Usaha (HGU) terhadap beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam skala yang besar diberbagai kawasan di Indonesia terutama di Kalimantan Timur. Orangutan (*Pongo Pygmaeus Morio*) sebagai salah satu penyangga dan penjaga keseimbangan ekosistem ekologi dianggap tidak lagi berlaku karena primata Kalimantan ini justru dianggap sebagai hama yang perlu untuk dibasmi. Hal ini tentu saja menjadi sebuah ironi karena jauh sebelum adanya kehadiran perusahaan sawit, Orangutan sudah hidup di habitat aslinya tanpa harus dianggap sebagai pengganggu dan hama kelapa sawit. Perusahaan kelapa sawit menganggap Orangutan sebagai hama atau pengganggu yang dapat mengganggu hasil sawit Di desa Puan Cepak kecamatan Muara Kaman Kutai Kartanegara dimana tempat perusahaan perkebunan sawit asal Malaysia PT Khaleda Agroprima Malindo (KAM) beroperasi, di Muara Kaman telah terjadi pembunuhan terhadap Orangutan.

Pada pertengahan November tahun 2011 Polres Kutai Kartanegara menangkap dua tersangka pelaku pembunuh Orangutan, yakni Imam Muhtarom dan Mujianto. Keduanya merupakan pegawai perusahaan kebun kelapa sawit PT Khaleda Agroprima Malindo yang juga anak perusahaan Metro Kajang Holdings (MKH) Berhad di desa Puan Cepak atas perintah perusahaan. Dalam beberapa hari kedepan kemudian, Polres Kutai Kartanegara kembali menangkap dua tersangka lainnya yaitu Manager PT Khaleda Agroprima Malindo Phuah Chuan dan karyawannya Widianoro. Para tersangka dihadapkan pada UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Ada beberapa dampak dari kasus pembunuhan Orangutan yang terjadi di Muara Kaman:

1. Berkurangnya Populasi Orangutan di Muara Kaman
2. Kasus Pemusnahan Orangutan menjadi pemberitaan Media Lokal, Nasional dan Internasional

3. Penolakan Minyak Kelapa Sawit dari Indonesia

Pembunuhan Orangutan di Muara Kaman yang melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT KAM adalah peristiwa yang mengundang keprihatinan banyak pihak. Pemerintah Indonesia dianggap tidak acuh dan mengabaikan keberlangsungan kehidupan Orangutan sebagai salah satu satwa yang dilindungi di Indonesia.

Penulis melihat penelitian yang diberikan oleh jurnal ini memberikan implikasi bahwa pembantaian Orangutan yang melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT KAM ini dilakukan secara terencana dan sistematis melalui kebijakan perusahaan. Disini penulis juga mendapatkan masukan tentang bagaimana dampak-dampak yang diakibatkan dari kasus pemusnahan Orangutan ini yaitu seperti berkurangnya populasi Orangutan di Muara Kaman, kasus pemusnahan Orangutan menjadi pemberitaan media lokal, nasional dan internasional dan juga adanya penolakan minyak kelapa sawit dari Indonesia.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan jurnal ini adalah penelitian penulis lebih terfokus terhadap upaya WWF dalam menangani Orangutan yang terkena dampak dari kebakaran hutan tahun 2015, sedangkan jurnal ini lebih membahas mengenai pembantaian Orangutan yang melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT KAM dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melindungi Orangutan di Kalimantan Timur.

I.6 Kerangka Pemikiran

Teori Politik Hijau (Green Politics)

Politik Hijau merupakan wadah usulan politik yang dikembangkan oleh pencinta lingkungan guna menuju masyarakat berkelanjutan. Suara protes yang berawal dari kalangan minoritas pecinta lingkungan seperti ilmuwan, aktivis dan kelas menengah, kini telah mampu membawa isu ini menjadi perhatian masyarakat

dunia internasional. Atas nama masa depan yang terancam punah, para pendukung pendekatan lingkungan ingin secara radikal mengurangi konsumsi masa sekarang, untuk membantu generasi yang lebih kaya di masa depan yang akan jauh lebih maju secara teknologi (Klaus 2008, hlm.34)

Hal ini terlihat dengan realisasi Konferensi Lingkungan Hidup yang diadakan oleh PBB untuk pertama kalinya pada tahun 1972 yang bertempat di Stockholm dengan membahas mengenai Hukum Internasional Lingkungan. Konferensi yang diorganisir oleh PBB tahun 1972 mengenai lingkungan hidup ini, sebagai respon atas peningkatan dramatis dalam perhatian lingkungan hidup internasional sejak tahun 1960an (Baylis & Smith 2001, hlm.390). Sejak saat itu, kerjasama internasional dalam lingkup permasalahan lingkungan hidup mulai semakin dikembangkan oleh negara-negara maju dan berkembang. Bahkan, setelah adanya Konferensi ini juga telah membuka debat internasional mengenai permasalahan lingkungan hidup.

Semakin diangkatnya permasalahan lingkungan hidup juga ikut dibarengi dengan aktivis gerakan lingkungan hidup yang terus tumbuh dan semakin berkembang, terutama di kawasan Eropa dan Amerika. Gerakan ini mengancam modernitas, dengan produk industrialisasinya, sebagai salah satu penyebab terjadinya permasalahan lingkungan yang semakin parah. Selama tahun 1970an dan awal tahun 1980an beberapa organisasi-organisasi lingkungan mengembangkan strategi independen diseluruh isu-isu global, seperti The International Union For The Conservation Of Nature (IUCN) misalnya yang tetap melanjutkan untuk mempromosikan kolaborasi diantara konservasionis dan mengkoordinasikan pertukaran informasi melalui publikasi dan konferensi-konferensi reguler, bekerja sama dengan WWF (Keck & Sikkink 1998, hlm.125)

Politik Hijau jauh lebih skeptis tentang klaim bahwa negara-sistem, dan struktur lain dari politik dunia, dapat memberikan respon seperti itu (Burchill dkk. 2005, hlm.235). Topik tentang lingkungan hidup menjadi semakin sering muncul dalam agenda internasional lebih dari tiga dekade terakhir. Populasi global yang terus secara

cepat mengalami peningkatan dan juga dibarengi dengan standar kehidupan manusia yang semakin tinggi tentu saja merupakan ancaman potensial terhadap lingkungan hidup. Banyak tulisan-tulisan para pemikir Hijau, dan praktek-praktek gerakan Hijau, mengandung kedua analisis dari dinamika politik global, dan visi normatif mengenai restrukturisasi politik dunia (Burchill dkk. 2005, hlm.235).

Produksi massal industri pun diduga dapat menjadi pemicu terjadinya degradasi lingkungan hidup dan terancamnya eksistensi sumber daya material dan energi terutama yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara dan minyak bumi yang cenderung lebih eksploitatif dalam pemanfaatannya. Padahal residu sisa atau gas sisa penggunaan energy tersebut ternyata dapat mengancam keamanan lingkungan hidup mengingat residu gas sisa hasil pembakaran tersebut mengandung zat - zat seperti karbon dioksida (CO₂), karbon monoksida (CO) atau residu yang dihasilkan dari terbakarnya sampah yaitu metana (CH₄) dapat menimbulkan fenomena pemanasan global bahkan justru untuk waktu sekarang ini semakin memperparah terjadinya pemanasan global. Aktivitas ekonomi dan sosial manusia berjalan dengan cara yang mengancam lingkungan hidup (Jackson & Sorensen 2013, hlm.502).

Meskipun mengenai 'isu lingkungan' yang dimana posisi Teori Hijau pada posisi politik global telah muncul namun mungkin tidak terlalu begitu menonjol di mata publik seperti ketika berada di awal era 1990-an, beberapa pengamat politik global yang serius mengamati teori ini menimbulkan pikiran bahwa teori ini telah kembali (atau akan melakukannya) untuk posisi marginal mereka yang telah mereka duduki sebelum periode itu (Burchill dkk. 2005, hlm.235).

Relasi Teori Politik Hijau (Green Politics) dengan penelitian yang penulis bahas adalah pemakaian teori ini sebagai salah satu dasar pandangan dalam melihat isu kebakaran hutan tahun 2015 yang penulis bahas. Penulis juga menggunakan teori ini sebagai salah satu variabel dasar dalam mencari solusi pertanyaan penelitian yang penulis teliti.

Konsep International Non-Governmental Organization

Interaksi dalam dunia internasional tidak hanya didominasi oleh negara, melainkan telah banyak bermunculan aktor lainnya yang turut berusaha meningkatkan interaksi satu dengan yang lainnya dalam tujuan untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Baik aktor negara maupun non negara pada dasarnya seringkali tergabung dalam beberapa organisasi internasional yang digunakan sebagai wadah pencapaian kepentingannya. Munculnya lingkungan hidup global sebagai isu utama dalam dunia politik bertepatan dengan bangkitnya Non-Governmental Organization (NGO) sebagai kekuatan baru di dalam politik lingkungan hidup. (Porter & Brown 1996, hlm.50). NGO biasanya secara politis independen dari negara berdaulat manapun, sehingga mereka dapat membuat dan melaksanakan kebijakan internasional dengan lebih cepat dan langsung, dan dengan risiko yang lebih kecil terhadap sensitivitas nasional, daripada IGO (International Governmental Organization) (Mingst 1999, hlm.257).

Organisasi non pemerintah internasional yang dimana anggota-anggota di dalamnya merupakan aktor-aktor non negara dikenal sebagai *International Non-Governmental Organization* (INGO). Dampak dari INGO pada proses globalisasi, termasuk peran INGO bermain dalam persaingan model pemerintahan global (Christensen 2006, hlm.282). INGO yang mungkin merupakan sebuah federasi afiliasi nasional yang bebas atau struktur yang lebih terpusat, atau sebuah tongkat yang mewakili banyak organisasi-organisasi di dalam wilayah geografis tertentu (Porter & Brown 1991, hlm.57).

Munculnya lingkungan hidup global sebagai isu utama dalam dunia politik bertepatan dengan bangkitnya organisasi non pemerintah (NGO) sebagai kekuatan baru di dalam politik lingkungan hidup. (Porter & Brown 1996, hlm.50). NGO semakin dikenal sebagai aktor yang berpengaruh dalam kegiatan pemerintahan global (Mingst 1999, hlm.255).

Sebelum INGO terbentuk, akses untuk aktor non negara dalam memasuki interaksi internasional sangat terbatas, baik dalam bidang keamanan, politik, ekonomi dan beberapa aspek lainnya. Keadaan ini dapat terjadi dikarenakan pemerintahan resmi atau negara cenderung untuk memproteksi interaksi yang ada dengan negara-negara yang lainnya agar pada nantinya kebijakan yang diambil oleh negara tidak dipengaruhi atau terpengaruh oleh aktor-aktor selain negara. INGO hadir sebagai wadah bagi para individu, masyarakat, dan elemen negara untuk turut berinteraksi dalam dunia internasional dan untuk berperan serta dalam proses perkembangan dan juga perubahan sosial yang bisa jadi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah atau negara (Lewis 2009, hlm.1).

Tujuan pembentukan INGO dapat dibedakan menjadi dua aspek. Pertama adalah INGO yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, contoh seperti Oxfam International yang mempunyai tujuan untuk memerangi kemiskinan dan ketidakadilan di seluruh dunia, sedangkan untuk tujuan yang kedua adalah INGO yang didirikan untuk bergerak di bidang advokasi kebijakan dan kampanye untuk mengejar perubahan sosial, contoh World Wide Fund For Nature (WWF) yang bergerak dalam bidang konservasi, penelitian dan restorasi lingkungan (Lewis 2009, hlm.1).

Disisi lain, ruang lingkup INGO yang lebih luas dan fleksibel jika dibandingkan dengan badan-badan pemerintah yang lainnya membuktikan bahwa individu atau aktor-aktor non negara memiliki kapabilitas dan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan di lingkup global serta mampu bergerak lebih fleksibel dalam beberapa isu-isu terutama yang berketerkaitan dengan isu-isu lingkungan dan untuk melindungi sumber daya alam tertentu. INGO memiliki potensi besar untuk mempengaruhi internasional, nasional, dan kebijakan lokal dan telah menunjukkan bahwa memiliki potensial dalam banyak hal (Christensen 2006, hlm.285).

Dalam realitanya, INGO memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang dibuat negara. Sifat INGO yang independen, membuat

INGO mampu memberikan perspektif yang lebih luas kepada suatu negara dan permasalahan tertentu (Lewis 2009, hlm.4). Sebuah NGO dapat sebagai pendorong perubahan kebijakan, dan pemerintah pada kemudian hari dapat mengubah kebijakannya (Suter 2006, hlm.162-163).

Relasi Konsep *International Non-Governmental Organization* (INGO) dengan penelitian yang penulis bahas adalah pemakaian konsep ini sebagai salah satu variabel dasar dalam mengkaji dan meneliti peran dan ruang lingkup WWF di Indonesia dalam konteks upaya menangani Orangutan yang terkena dampak dari kebakaran hutan tahun 2015 di Indonesia.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi Penelitian

WWF sebagai organisasi non pemerintah internasional yang bergerak dalam bidang konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati dan isu-isu lingkungan hidup lainnya dalam melakukan aktivitasnya di Indonesia melakukan berbagai upaya yang salah satunya yaitu upaya dalam menangani Orangutan yang terdampak kebakaran tahun 2015 di Indonesia.

I.9 Metode Penelitian

I.9.1 Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan mekanisme dan proses di dalam suatu penelitian yang dimana peneliti memulai berpikir secara induktif. Penelitian ini menganalisis berdasarkan bagaimana implementasi dari upaya yang dilakukan oleh WWF dalam menangani dampak kebakaran hutan tahun 2015 terhadap Orangutan di Indonesia.

I.9.2 Jenis Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian dengan menggunakan data berupa pernyataan yang bersifat kualitas untuk dijadikan variabel pemahaman. Dengan teknik analisisnya yaitu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena faktual yang ada baik yang sedang terjadi saat ini ataupun yang sudah lampau, kemudian memberikan penjelasan secara objektif dengan memuat data dan fakta yang tersedia, menghubungkan antar faktor-faktor sebagai unit analisis, dan kemudian menginterpretasikannya dalam tujuan untuk mendapatkan kesimpulan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran situasi faktual mengenai kebakaran hutan tahun 2015 di Indonesia dan upaya yang dilakukan oleh WWF dalam menangani dampak kebakaran hutan tahun 2015 terhadap Orangutan di Indonesia.

I.9.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh WWF dalam menangani dampak kebakaran hutan tahun 2015 terhadap Orangutan yang terjadi di Indonesia seperti upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh WWF. Kemudian selanjutnya yaitu adalah data sekunder, data-data yang berkaitan dengan kebakaran hutan tahun 2015 dan dampak kebakaran hutan terhadap Orangutan.

I.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kepada narasumber terkait dengan konteks permasalahan penelitian ini, dalam hal ini wawancara dilakukan ke WWF Indonesia untuk mendapatkan data-data mengenai upaya yang dilakukan oleh WWF dalam menangani Orangutan yang terdampak kebakaran hutan tahun 2015 di Indonesia. Dimana penulis berupaya untuk memaparkan dan menjelaskan secara terperinci tentang Upaya World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Menangani Dampak Kebakaran Hutan Tahun 2015 Terhadap Orangutan Di Indonesia.

Sedangkan untuk data sekundernya didapatkan melalui berbagai media seperti buku, jurnal, artikel dan juga literatur-literatur lainnya yang didapatkan di media cetak yang merupakan koleksi pribadi penulis atau yang terdapat di perpustakaan umum maupun media elektronik di internet. Pencarian data tersebut terkait dengan kebakaran hutan tahun 2015 yang terjadi di Indonesia, pengertian kebakaran hutan dan lahan, dan juga dampak kebakaran hutan terhadap Orangutan.

I.9.5 Teknik Analisa Data

Data-data yang telah didapat kemudian dikelola dan diproses untuk selanjutnya dianalisis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teori sebagai panduan untuk menginterpretasikan data-data yang telah didapat untuk kemudian dilakukan penyaringan lagi sehingga mendapatkan data-data yang bisa dipergunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis.

I.10 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA TAHUN 2015 DAN DAMPAKNYA TERHADAP ORANGUTAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kebakaran hutan dan lahan. Kemudian penulis akan menjelaskan mengenai kebakaran hutan tahun 2015 yang terjadi di Indonesia dan juga menjelaskan mengenai dampaknya terhadap Orangutan.

BAB III : UPAYA WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) DALAM MENANGANI DAMPAK KEBAKARAN HUTAN TAHUN 2015 TERHADAP ORANGUTAN DI INDONESIA?

Bab ini akan menjelaskan tentang upaya World Wide Fund For Nature (WWF) dalam menangani dampak kebakaran hutan tahun 2015 terhadap Orangutan di Indonesia. Pada bab ini penulis memfokuskan pada bagaimana upaya WWF dalam menangani Orangutan yang terkena dampak kebakaran hutan tahun 2015, dan juga akan menjelaskan mengenai upaya WWF di tahun 2016 dalam menangani permasalahan ini. Penulis juga akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai gambaran umum WWF Indonesia di awal bab ini.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan atas penelitian serta saran yang diberikan penulis terhadap permasalahan penelitian.